





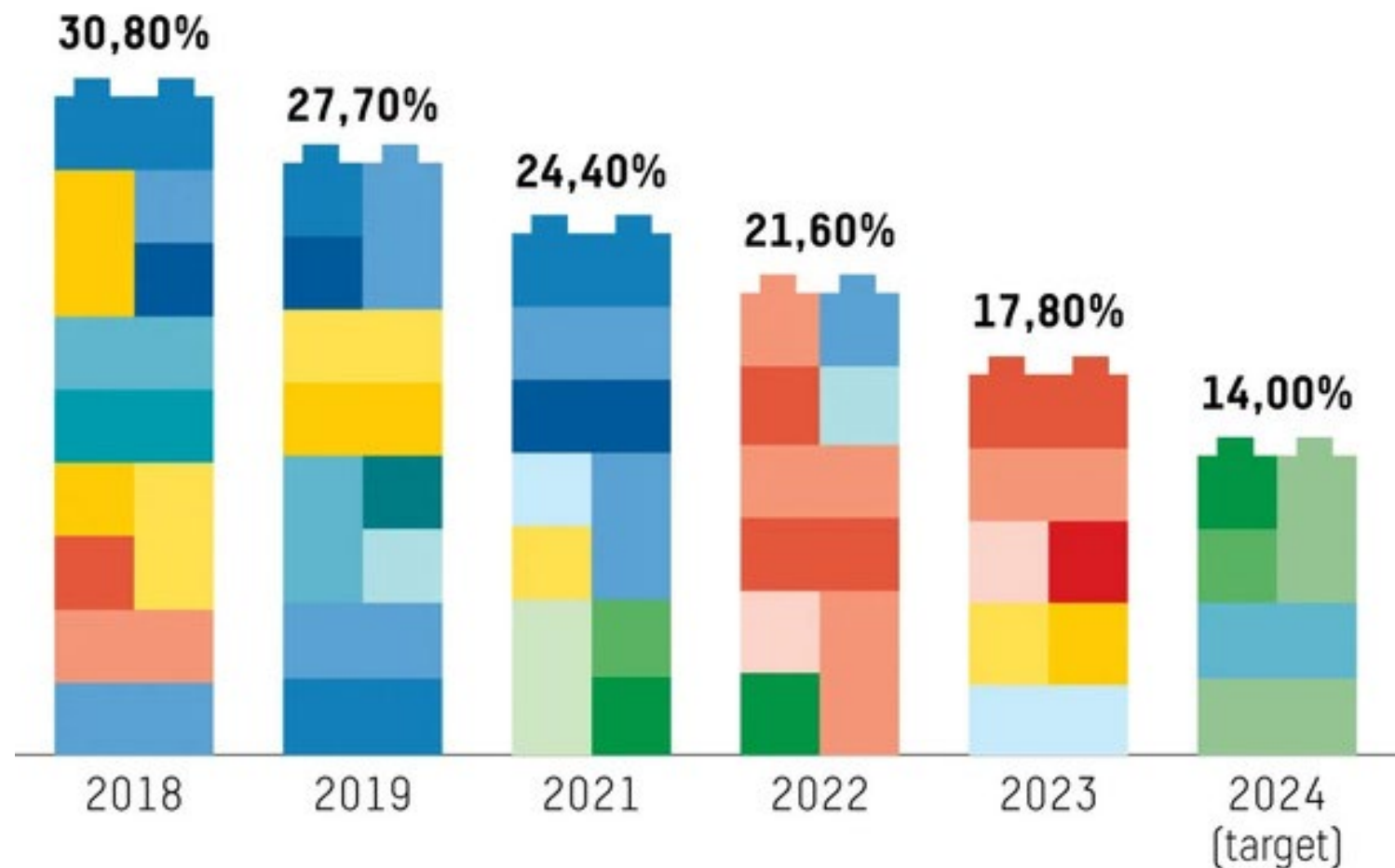
Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.



STUNTING DI INDONESIA

Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Prevalensi Balita Stunting Indonesia, 2018-2024

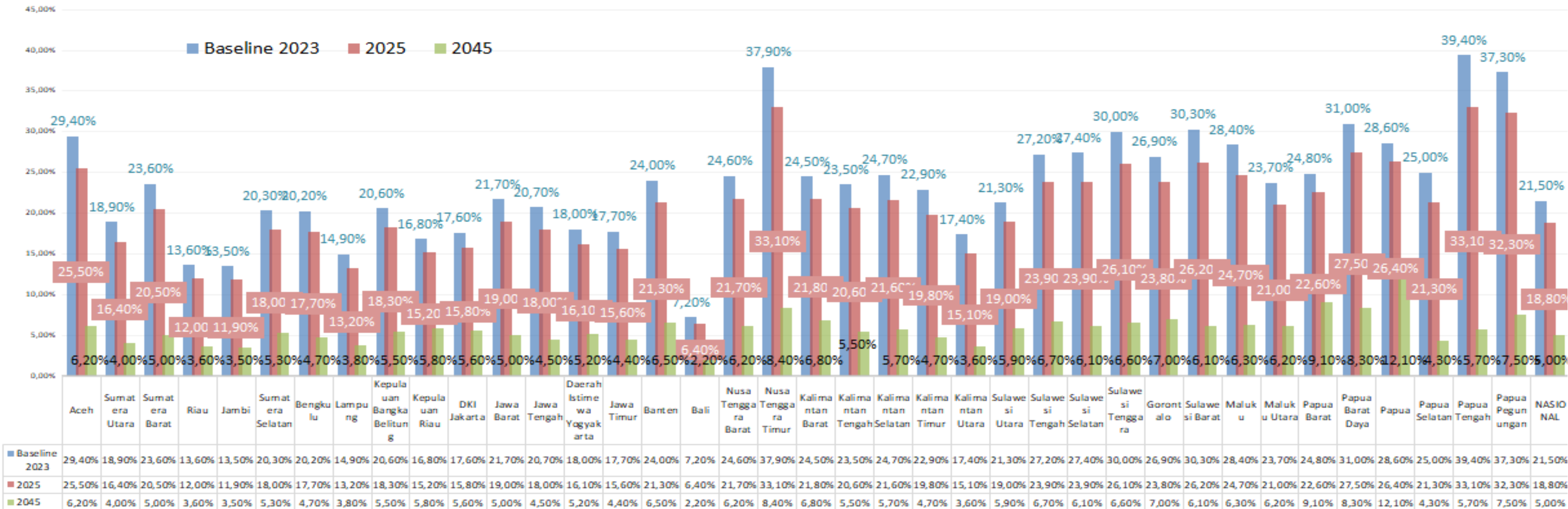


Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Indonesia, 2014-2023



TARGET PENURUNAN STUNTING

Berdasarkan Surat Bappenas No. B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024



1 Update Proyeksi Target Penurunan Stunting

	Baseline	2025	2029	2034	2039	2045
Target existing	21,5 (SKI, 2023)	13,5	11,0	8,6	6,6	5,0
Target updated	21,5 (SKI, 2023)	18,8	14,2	10	7,1	5,0

- Pemutakhiran target 2025 dalam RKP 2025 dan RT RPJMN 2025-2029
- Pemutakhiran target 2029 dalam RT RPJMN 2025-2029



Surat Edaran Kemendagri
No. 400.5.7/1685/Bangda ,
17 Maret 2025
tentang Pelaksanaan Aksi
Konvergensi Pencegahan dan
Percepatan Penurunan
Stunting



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

17 Maret 2025

Nomor : 400.5.7/1685/Bangda
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi *stunting* termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi Kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi *stunting* ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun 2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan pemerintah daerah tetap melaksanakan upaya PPPS terkonvergen. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Memastikan intervensi PPPS dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari:
 - ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
 - anak usia 0-23 bulan;
 - anak usia 24-59 bulan;
 - remaja putri;
 - calon pengantin; dan
 - keluarga dan masyarakat.
- Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing sasaran dengan indikator layanan sebagai berikut:

INDIKATOR LAYANAN
IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI
1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK;
2. Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan;
3. Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil;
4. Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan;
5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
ANAK USIA 0 – 23 BULAN
1. Praktik Inisiasi Menyusui Dini;
2. Bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif;
3. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam;
4. Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI;
5. Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
6. Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
7. Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
8. Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap;
9. Anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar;
10. Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM).

INDIKATOR LAYANAN

ANAK USIA 24 – 59 BULAN

- Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk;
- Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
- Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
- Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar;
- Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia;
- Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM).

REMAJA PUTRI

- Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri
- Skining anemia terhadap Remaja Putri

CALON PENGANTIN

- Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan;
- Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*.

RUMAH TANGGA MASYARAKAT

- Akses terhadap Air Minum Aman;
- Akses terhadap Sanitasi Aman;
- Kepemilikan JKN;
- Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan;
- Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

- Bahwa target penurunan *stunting* dan target capaian layanan melalui indikator sebagaimana tersebut diatas untuk dipastikan masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Pemerintah daerah agar melaksanakan PPPS secara terkonvergen dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi PPPS sebagaimana terlampir.
- Pemerintah provinsi agar tetap melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi kabupaten/kota Tahun 2024 sesuai dengan juknis Penilaian Kinerja yang telah ditetapkan.
- Untuk berkelanjutan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi PPPS dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Arifin Effendy Hutagalung Nomor Telp. 081287729875 dan Sdr. Iin Afriani Nomor Telp. 085717194385.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,
Restuady Daud

- Tembusan:
- Menteri Sekretaris Negara;
 - Menteri Dalam Negeri;
 - Menteri PPN/Bappenas;
 - Menteri Kesehatan; dan
 - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;

PENGEMBANGAN APLIKASI

WebAksiBangda Terintegrasi

Alur Integrasi

Web Aksi Bangda

- Laporan analitis.
- Dashboard interaktif.
- Rekomendasi kebijakan berbasis data.

Dukcapil

- Data demografi (NIK, jumlah keluarga, usia anak, status ekonomi).
- Sasaran berbasis rumah tangga dan individu untuk intervensi.

SIPD

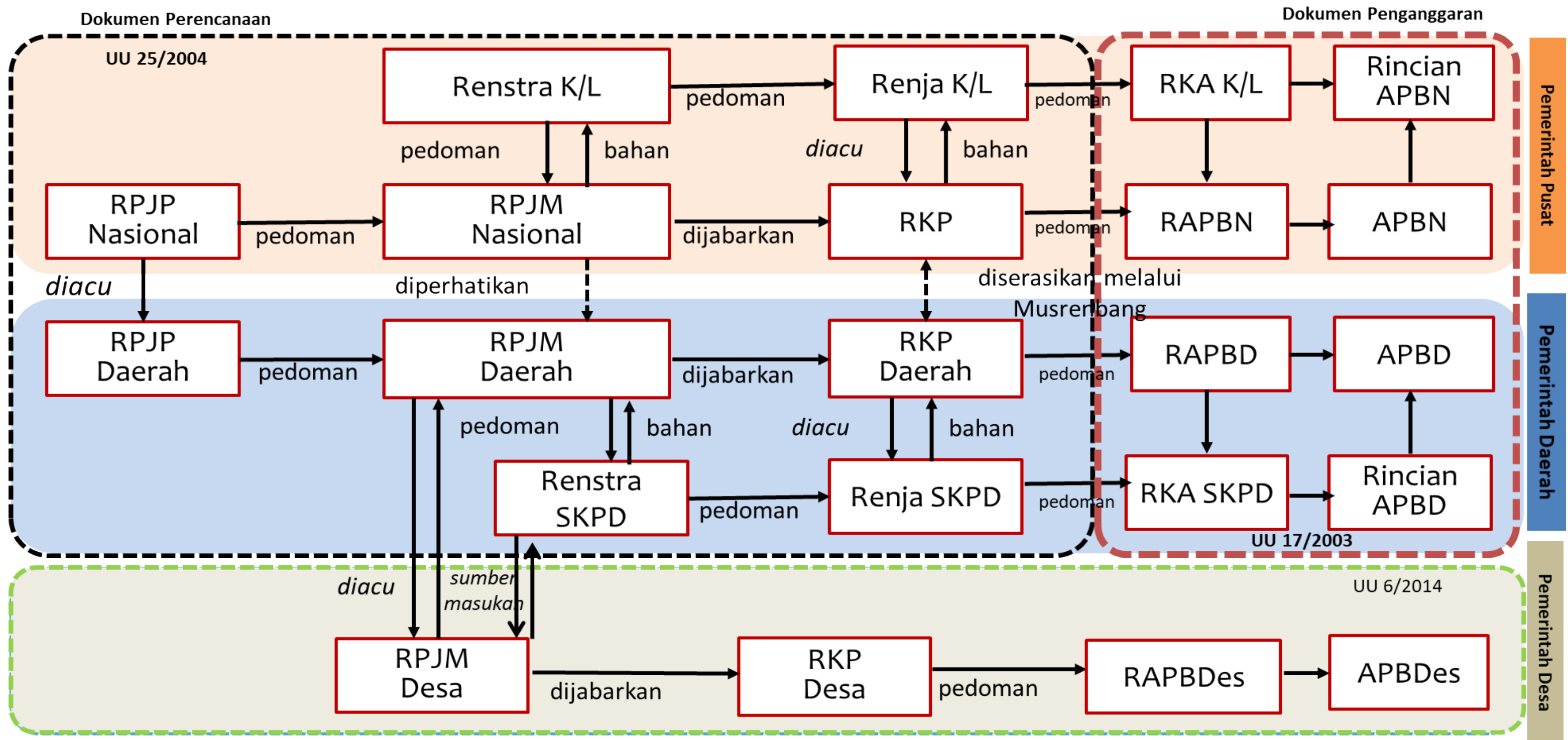
- Data alokasi anggaran tematik stunting.
- Realisasi anggaran berdasarkan wilayah dan jenis intervensi.

Adwil

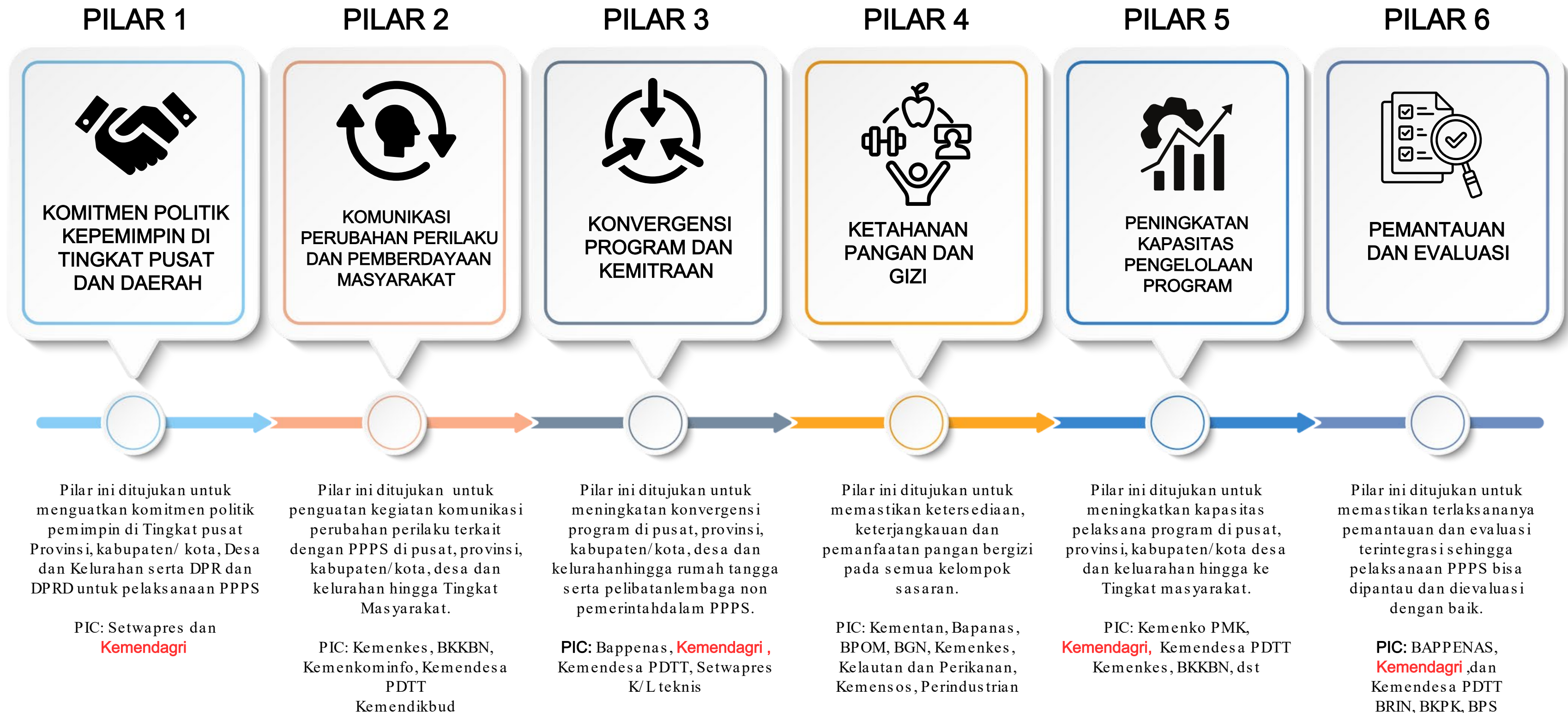
- Data peta kewilayahan (desa, kecamatan, kabupaten).
- Data kebutuhan wilayah seperti aksesibilitas layanan, infrastruktur, dan tingkat risiko stunting.



SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH



PERUBAHAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



REGULASI
PEMERINTAH
INDONESIA
DALAM UPAYA
PENURUNAN
STUNTING

**UNDANG-UNDANG NO.59 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2025-2045**
Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2025-2045

**PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025 - 2029**
Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029

PERATURAN PRESIDEN NO. 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Mengatur kerangka kerja nasional untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor.

PERATURAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
Fokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk mengatasi masalah gizi buruk yang berdampak pada stunting.

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NO. 59 TAHUN 2021
Panduan untuk integrasi 8 Aksi Konvergensi Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 440-842 TAHUN 2022
Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah.

REGULASI TERKAIT DANA DESA
Mendukung pemanfaatan Dana Desa untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, seperti intervensi gizi dan pembangunan sanitasi

SURAT EDARAN MENDAGRI 400.5.7/1685/Bangda
Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

DUKUNGAN REGULASI KEMENDAGRI DALAM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1

PERMENDAGRI NO 59 TAHUN 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Pemerintah Daerah menerapkan **SPM** untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Salah satu jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan kesehatan balita

2

PERMENDAGRI NO 12 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024/5



Pembangunan Daerah diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan, salah satunya meliputi: **Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesehatan**

3

PERMENDAGRI NO 15 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025



Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan **APBD TA 2025** dengan kebijakan pemerintah salah satunya yaitu pencapaian **SDG's** seperti penanggulangan stunting

4

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Tentang Perubahan atas Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



Menetapkan hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode fikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 440/2701/SJ Tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana Dan Program Percepatan Penurunan Stunting



Gubernur dan Bupati/Wali kota menjadikan Program Bangga Kencana dan Program Percepatan penurunan stunting sebagai prioritas daerah serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

6

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENDAGRI, MENKES, KEPALA BKKBN DAN KEPALA BPKP Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah (ditetapkan)



Kesepakatan Bersama menjadi pedoman dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.



Peran Kemendagri dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Aksi Konvergensi

